

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebagai konsekuensi atas pelaksanaan otonomi daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuensi atas dasar hukum tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Dan untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyajikan informasi keuangan yang berkualitas.

Maka untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, dibutuhkan adanya suatu standar akuntansi bagi pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar akuntansi memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu alasan tersebut adalah memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dan dapat dipercaya (Anis Chariri, Imam Ghozali, 2003).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP. No. 105 Tahun 2000 yang menyatakan “penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah”. Diperkuat dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini di jelaskan dalam PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Pengantar SAP, yakni :

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dengan adanya dasar peraturan tentang standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan standar akuntansi pemerintahan sebagai landasan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas dalam rangka menciptakan

terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Setelah disusun dan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 sebagai acuan dalam pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masih harus ditingkatkan lagi.

Menurut Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, dalam rapat paripurna penyerahan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2009 kepada DPR RI, “Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2009 mengungkapkan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD serta badan-badan lainnya masih memerlukan peningkatan, di antaranya kualitas penyusunan laporan keuangan, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern (SPI)”.

BPK telah melaksanakan Audit terhadap 189 entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 4 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 107 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 11 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 67 entitas dari 189 LKPD Tahun 2008 yang telah diperiksa BPK pada Semester II Tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Opini LKPD Tahun 2008/2009

Opini	LHP LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada IHPS I 2009		LHP LKPD Tahun 2008 yang dilaporkan pada IHPS II 2009		Total LHP LKPD Tahun 2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	8	3%	4	2%	12	3%
WDP	217	74%	107	57%	324	67%
TW	20	7%	11	6%	31	6%
TMP	48	16%	67	35%	115	24%
Jumlah	293	100%	189	100%	482	100%

Sumber: www.bpk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Opini BPK terhadap 189 entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2008 masih didominasi dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di urutan pertama sebanyak 324 entitas atau sebesar 67%, kemudian di urutan kedua ditempati dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 115 entitas atau 24%, di urutan ke 3 dengan opini Tidak Wajar (TW) sebanyak 31 entitas atau 6% dan di urutan terakhir yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya 12 entitas saja atau sebesar 3%.

Tabel 1.2
Opini LKPD Kabupaten dan Kota
Di Wilayah Priangan Jawa Barat

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini BPK
1	Kabupaten Bandung	Wajar Dengan Pengecualian
2	Kabupaten Bandung Barat	Tidak Memberikan Pendapat
3	Kota Cimahi	Wajar Dengan Pengecualian
4	Kota Bandung	Wajar Dengan Pengecualian
5	Kota Tasikmalaya	Wajar Dengan Pengecualian
6	Kota Banjar	Wajar Dengan Pengecualian
7	Kabupaten Garut	Wajar Dengan Pengecualian
8	Kabupaten Sumedang	Wajar Dengan Pengecualian
9	Kabupaten Tasikmalaya	Wajar Dengan Pengecualian
10	Kabupaten Cianjur	Wajar Dengan Pengecualian
11	Kabupaten Ciamis	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber : www.bpk.go.id Laporan IHPS II BPK Tahun 2009 yang diolah kembali

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK tahun 2009 untuk pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Priangan Jawa Barat dalam tabel 1.2, terlihat jelas bahwa mayoritas opini yang diperoleh pemerintah kabupaten dan kota sebanyak 10 opini yang menyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 (satu) pemerintah daerah yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), yakni pemerintah kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan temuan BPK tersebut, menunjukkan bahwa kualitas laporan

keuangan pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya wilayah Priangan Jawa Barat masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini disebabkan opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah tersebut, masih dalam kategori wajar dengan pengecualian dan bahkan ada satu pemerintah daerah yang mendapat opini tidak memberikan pendapat. Menurut Arif Nur Alam, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), “laporan keuangan yang dinyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) memiliki potensi penyimpangan sangat besar. Laporan keuangan dapat dinyatakan berkualitas jika pemerintah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian”.

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartika Berliani dari Universitas Padjadjaran dengan judul “Peranan Pemahaman Aparatur Atas Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman aparatur atas penerapan PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Majalengka.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartika Beliani adalah subjek penelitiannya yang berbeda. Subjek penelitian yang akan diteliti lebih luas lagi mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Priangan Jawa Barat. Selain itu, perbedaan lainnya adalah penelitian ini lebih kepada penerapan standar akuntansi pemerintahannya.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang dijelaskan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang:

” Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat
3. Bagaimana Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Priangan Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat
2. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat
3. Untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Priangan Jawa Barat

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penulisan penelitian ini, diharapkan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1.4.1. Aspek Teoritis

- a. Pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Priangan dapat memperoleh manfaat pengetahuan lebih dalam tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mampu menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintahan dengan efektif dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah

- b. Akademis yaitu guna mengembangkan dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan.

1.4.2. Aspek Praktis

- a. Penulis

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang pentingnya diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai suatu standar dan peraturan dalam penyajian laporan keuangan.

- b. Masyarakat

Sumber masukan bagi masyarakat agar dapat memberikan partisipasi, kontrol dan memberikan kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan daerah dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.